

TESIS

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA BAPPEDA
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, HUMAN RESOURCES
COMPETENCE AND THE USING OF INFORMATION TECHNOLOGY ON
BUDGET ABSORPTION AT THE BAPPEDA
OF NORTH TORAJA REGENCY*

**HENDRA PONGSILURANG
A042192040**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA BAPPEDA KABUPATEN TORAJA UTARA

THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, HUMAN RESOURCES COMPETENCE AND THE USING OF INFORMATION TECHNOLOGY ON BUDGET ABSORPTION AT THE BAPPEDA OF NORTH TORAJA REGENCY

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**HENDRA PONGSILURANG
A042192040**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA BAPPEDA
KABUPATEN TORAJA UTARA**

***THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, HUMAN RESOURCES
COMPETENCE AND THE USING OF INFORMATION TECHNOLOGY ON
BUDGET ABSORPTION AT THE BAPPEDA
OF NORTH TORAJA REGENCY***

disusun dan diajukan oleh

**HENDRA PONGSILURANG
A042192040**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

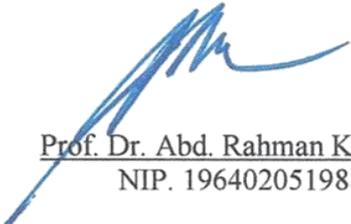
Pada tanggal 25 Februari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001


Prof. Dr. Maat Pono, SE., M.Si.
NIP. 195807221986011001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hendra Pongsilurang

NIM : A042192040

Jurusan/program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA BAPPEDA
KABUPATEN TORAJA UTARA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Februari 2022
Menyatakan,

Hendra Pongsilurang



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. Bapak **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM**, dan Bapak **Prof. Dr. Maat Pono, M.Si.**, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada tim penguji Ibu **Dr. Fatmawati, SE.,M.Si**, Bapak **Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si** dan Ibu **Dr. Djumidah maming, SE.,M.Si.** yang telah memberi saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Terima kasih kepada ayah dan ibu, istri, saudara-saudara, teman-teman peneliti, serta pihak akademik atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Rantepao, Februari 2022

Peneliti

ABSTRAK

HENDRA PONGSILURANG. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Penyerapan Anggaran pada Bappeda Kabupaten Toraja Utara (dibimbing oleh Abdul Rahman Kadir dan Maat Pono).*

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer. Sampel sebanyak 56 responden. Responden tersebut merupakan aparatur pengelola anggaran, yaitu kepala bagian perencanaan dan bendahara pengeluaran di setiap satuan kerja sebanyak 30 organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan alat bantu *statistical package for the social sciences* (SPSS) versi 24.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran; (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran; dan (3) penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Kata kunci: perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, penyerapan anggaran



ABSTRACT

HENDRA PONGSILURANG. *Effect of Budget Planning, Human Resource Competence and Use of Information Technology on Budget Absorption at BAPPEDA North Toraja Regency (Supervised by Abdul Rahman Kadir and Maat Pono)*

This study aims to determine the effect of budget planning, human resource competence and the use of information technology on budget absorption, in the North Toraja Regency Government.

This study used a quantitative approach. The data used were primary data. The sample was 56 respondents. The respondents were budget management apparatus, namely the head of the planning section, and the treasurer of expenditures in each work unit as many as 30 regional government organizations of North Toraja Regency. Data were collected through a survey using multiple regression analysis (multiple regression) with the statistical package for the social sciences (SPSS) version 24.

The results of the study show that (1) budget planning has an effect on budget absorption; (2) the competence of human resources affects the absorption of the budget; (3) the use of information technology affects the absorption of the budget.

Keywords: planning, human resource competence, use of information technology, and budget absorption



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	13
1.4.2 Kegunaan Praktis	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	16
2.1.1 Penyerapan Anggaran	16
2.1.2 Perencanaan Anggaran	18
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	23
2.1.4 Penggunaan Teknologi Informasi	26

2.2	Tinjauan Empiris	31
BAB III KERANGKA DAN HIPOTESIS		34
3.1	Kerangka Pemikiran	34
3.2	Hipotesis	34
3.2.1	Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran	34
3.2.2	Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran.....	37
3.2.3	Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Penyerapan Anggaran.....	39
BAB IV METODE PENELITIAN		42
4.1	Rancangan Penelitian.....	42
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	42
4.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	43
4.4	Jenis dan Sumber Data	44
4.5	Metode Pengumpulan Data	44
4.6	Variabel Penelitian dan definisi Operasional	45
4.6.1	Variabel Penelitian.....	45
4.6.2	Definisi Operasional	45
4.7	Instrumen Penelitian	48
4.8	Teknik dan Analisis Data	49
4.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	49
4.8.2	Pengujian Kualitas Data.....	49
4.8.3	Pengujian Asumsi Klasik.....	50
4.8.4	Pengujian Hipotesis	52
BAB V HASIL PENELITIAN		54
6.1	Deskripsi Data Penelitian	54
6.2	Karakteristik Responden Penelitian.....	55
6.3	Statistik Deskriptif.....	57

6.4	Uji Kualitas Data	66
6.5	Uji Asumsi Klasik	69
6.6	Pengujian Hipotesis	72
BAB VI PEMBAHASAN.....		77
6.1	Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran	77
6.2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran	78
6.3	Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Penyerapan Anggaran	80
BAB VII PENUTUP.....		82
7.1	Kesimpulan	82
7.2	Implikasi	83
7.3	Keterbatasan Penelitian	84
7.4	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.....	6
Tabel 1.2. Persentase Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 – 2020.....	8
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	48
Tabel 5.1 Karakteristik Responden Penelitian	54
Tabel 5.2 Deskripsi Kuesioner Penelitian	55
Tabel 5.3 Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 5.4 Ikhtisar Rentang Skala	60
Tabel 5.5 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Perencanaan Anggaran (X1)	61
Tabel 5.6 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2).....	63
Tabel 5.7 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Penggunaan Teknologi Informasi (X3).....	64
Tabel 5.8 Deskripsi item Pertanyaan Variabel Penyerapan Anggaran (Y).....	65
Tabel 5.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.....	68
Tabel 5.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	69
Tabel 5.11 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	70
Tabel 5.12 Hasil Uji Asumsi Non-Multikolinieritas	71
Tabel 5.13 Hasil Uji Hipotesis Pertama	72
Tabel 5.14 Hasil Uji Hipotesis Kedua	73
Tabel 5.15 Hasil Uji Hipotesis Ketiga.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Penelitian.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner	91
2. Statistik Deskriptif	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menciptakan perubahan yang mendasar terhadap tata pelaksanaan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, serta menjadi langkah awal kemunculan Otonomi Daerah. Otonomi daerah mengamankan pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dan keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah pusat guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda (Philip Mahwood, 1983). Sejalan dengan pendapat tersebut, Vincent Lemius (1986) juga mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kebebasan atau kewenangan dalam mengambil suatu keputusan politik maupun administratif sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penerapan undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi harapan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan sistem pemerintahan daerah, potensi

dan keanekaragaman daerah, serta budaya dan tantangan dalam persaingan global. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu mempercepat laju kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah (Yani, 2013). Lebih sederhana dikatakan oleh Oates (1977) bahwa adanya desentralisasi memungkinkan penyesuaian pelayanan publik dengan permintaan lokal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, dan menciptakan persaingan antar jurisdiksi. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom tersebut, salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah adalah masalah anggaran dan pengelolaannya. Secara umum anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana terperinci dari pendapatan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya-sumber daya lainnya pada satu periode tertentu (Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007). Sedangkan menurut Robert D Lee, et al. (1978) bahwa *“Budget a document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals”*.

Demikian halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga merupakan pelaksana pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dalam periode satu tahun. Yani (2013) menyatakan bahwa langkah awal dari pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa segala bentuk Penerimaan Daerah

maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun anggaran APBD juga mengikuti tahun anggaran APBN yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Total pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Belanja adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Erlina, 2008). Sedangkan Permendagri nomor 21 tahun 2011, mendefinisikan belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu serapan belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian bukan berarti capaian penyerapan anggaran belanja diperbolehkan lebih rendah dari yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran merupakan rencana sistematis yang berisikan tentang keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang berlaku dalam waktu tertentu untuk selanjutnya

diwujudkan secara nyata (Mardiasmo, 2009). Secara garis besar penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu.

Persoalan penyerapan anggaran melebihi pagu anggaran masih kerap terjadi di beberapa kementerian maupun lembaga dan satuan kerja pemerintah. Untuk penyerapan belanja yang rendah memiliki resiko lebih luas; BPKP (2011) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang tidak memenuhi target menyebabkan dana terlambat atau bahkan tidak tersalurkan kepada masyarakat dan tidak tersalurkan ke sistem perekonomian, sehingga penerima manfaat tidak sepenuhnya bisa menikmati hasil pembangunan dan pelayanan yang dibiayai oleh anggaran publik. Senada dengan pernyataan tersebut, hasil penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menyatakan bahwa penyerapan anggaran belanja yang rendah adalah permasalahan serius yang akan memperburuk perekonomian secara umum (Willy, 2013).

Terdapat dua sudut pandang terkait rendahnya penyerapan anggaran, yang pertama yaitu jumlah realisasi anggaran pada akhir tahun diperbandingkan dengan jumlah anggarannya, dan yang kedua dari segi ketidakproporsionalan serapannya (Halim, 2014). Kondisi penyerapan anggaran yang rendah memperlihatkan adanya permasalahan yang serius dikalangan pengguna anggaran yang selalu saja terulang setiap tahun. Dan apabila dikaji lebih runut, belanja pemerintah memang selalu melonjak drastis dipertengahan sampai akhir triwulan ketiga tahun anggaran. Trennya adalah empat bulan terakhir selalu melonjak dengan sangat tajam (Anfujatin, 2016).

Meskipun dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, tinggi rendahnya penyerapan anggaran bukanlah merupakan target alokasi anggaran karena anggaran berbasis kinerja lebih fokus pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah *output* serta *outcome*-nya. Akan tetapi variabel pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sampai saat ini masih lebih didominasi oleh faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama percepatan pertumbuhan. Jadi, kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, makin awal pelaksanaan kegiatannya maka manfaat serta efek stimulusnya juga akan semakin besar. Dan apabila pelaksanaannya cenderung lambat bahkan hingga akhir tahun, maka yang dirugikan adalah masyarakat, karena manfaat yang akan diterima tertunda (Halim, 2014).

World Bank (2015) menyebut bahwa negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia mempunyai permasalahan yang seragam dalam penyerapan anggaran yang disebut "*slow back-loaded*", artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran. Penumpukan pencairan dana ditriwulan IV merupakan cerminan bahwa penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan (Syarah, 2016).

Permasalahan "*slow back-loaded*", juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, salah satunya terjadi pada kabupaten Toraja Utara. Seluruh kabupaten yang berada dalam lingkup wilayah pemprov Sulawesi Selatan memiliki permasalahan yang sama dalam penyerapan anggaran. Sekalipun

penyerapan memenuhi target pada akhir tahun, namun persentase capaian terlihat menumpuk diakhir tahun anggaran. Pola semacam ini tentu tidak sehat untuk perekonomian daerah dan kemakmuran masyarakat secara umum. Salah satu kabupaten yang menjadi perhatian adalah kabupaten Toraja Utara yang dianggap belum mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran. Permasalahan seperti ini disebabkan kurang maksimalnya kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut hasil pencairan anggaran belanja pemerintah kabupaten Toraja Utara tahun 2017-2020.

Tabel 1.1. Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 - 2020

Tahun	Triwulan				Total
	I	II	III	IV	
2017	8,53%	19,14%	42,47%	90,35%	40,12%
2018	5,12%	22,35%	52,35%	94,12%	43,49%
2019	2,88%	9,30%	57,99%	93,56%	40,93%
2020	4,76%	28,07%	46,26%	96,12%	43,80%
Rata-Rata	5,32%	19,72%	49,77%	93,54%	42,09%

Sumber: Pemkab Toraja Utara (Data diolah)

Target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Toraja Utara tersebut, sesuai dengan pola ideal penyerapan anggaran yang dipersyaratkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu 2020 yaitu 15% untuk triwulan pertama, 20-25% untuk triwulan kedua, 30-35 untuk triwulan ketiga dan 20-30% untuk triwulan keempat. Berdasarkan data Dirjen Perbendaharaan, tren penyerapan anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2014 pada triwulan pertama hanya berkisar 9,5% dan untuk triwulan kedua sebesar 18,4%. Hal tersebut memaksa terjadinya penumpukan pada triwulan ketiga dan keempat.

Rendahnya capaian penyerapan anggaran, sangat bertentangan dengan prinsip “*the three Es*” (Ekonomis, Efisien, Efektif) dalam teori anggaran sektor publik (Jones dan Pendlebury, 1998). Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak terhadap perekonomian nasional secara umum. Pertama, tidak berjalannya fungsi kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi secara efektif. Kedua, hilangnya manfaat belanja disebabkan anggaran yang telah dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi *idle money*. Ketiga, terlambatnya pelaksanaan program pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Keempat, penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran yang sangat tidak sehat bagi manajemen kas pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal (Seftianova 2013). Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktifitas tenaga kerja, pengurangan angka kemiskinan dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi (David, 2010). Penelitian Priatno (2013) menyimpulkan bahwa apabila penyerapan anggaran yang rendah masih terus berlanjut, hal ini akan mengganggu rencana kinerja kebijakan APBD terhadap perekonomian secara umum dan akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan yang merupakan sasaran kebijakan fiskal secara khusus.

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh rendahnya penyerapan anggaran yang disebutkan di atas secara nyata dapat dilihat pada kabupaten Toraja Utara. Seperti halnya persentase angka kemiskinan yang menjadi angka

tertinggi di beberapa kabupaten dalam lingkup wilayah pemprov Sulawesi Selatan. Berikut persentase angka kemiskinan kabupaten Toraja Utara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.2. Persentase Kemiskinan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 - 2020

Tahun	Jiwa	%
2015	34,37	15,19%
2016	33,02	14,57%
2017	32,85	14,41%
2018	30,662	13,37%
2019	28,88	12,41%
2020	27,881	12,01%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Selatan

Pada dasarnya, perencanaan (planning) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Robbins dan Coulter, 2002 dalam Bastian, 2010). Sementara itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahap perencanaan anggaran pemerintah daerah dikoordinir oleh satuan kerja daerah, sementara untuk tahap penganggaran dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap tahun, penyusunan APBD dimulai dari penyusunan RKPD dengan menyiapkan rancangan kebijakan umum, program indikatif, dan pagu indikatif. Rancangan RKPD ini selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan. Setelah disepakati bersama dengan DPRD, maka kebijakan umum anggaran serta

program prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disahkan, akan menjadi dasar bagi satuan kerja untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA ini selanjutnya digunakan untuk menyusun RAPBD yang kemudian wajib disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan diperbaiki sebelum disetujui untuk ditetapkan menjadi APBD (PP No 58 tahun 2005). Prinsip anggaran yang diterapkan oleh pemerintah adalah anggaran berbasis kinerja, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja yang ditetapkan terlebih dahulu. Idealnya kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan baik dari segi jenis maupun jumlahnya dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat meminimalisir deviasi antara kebutuhan dengan jenis dan jumlah kegiatan yang dicantumkan dalam RKA (Anfujatin, 2016).

Pada dasarnya harapan penyerapan anggaran yang maksimal tanpa dibarengi dengan perencanaan anggaran yang baik dapat dikatakan sebagai suatu hal yang hampir mustahil akan terwujud (Halim, 2014). Yunarto (2011) juga mengemukakan bahwa, perencanaan anggaran yang buruk sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga harus direvisi atau bahkan tidak dapat direalisasikan sama sekali. Selain perencanaan, kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga merupakan unsur utama dalam pengelolaan anggaran. SDM merupakan rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi (Mathis dan Jackson, 2006). SDM menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, dengan kompetensi berupa pengalaman dan

motivasi yang dimiliki menjadikan SDM sebagai faktor kunci dalam pengelolaan anggaran (Zarianah, 2015). Kompetensi SDM memang mutlak diperlukan agar pengelolaan anggaran dapat terlaksana dengan baik karena SDM yang buruk menjadikan pengelolaan anggaran buruk dan berakibat terlambatnya realisasi anggaran (Nina et al. 2016). Senada dengan itu, hasil penelitian Sutiono (1997) juga menemukan bahwa faktor yang memengaruhi lambatnya daya serap keuangan, salah satunya disebabkan karena kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan belum memadai dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah. Kondisi seperti ini dapat dilihat dari masih adanya pejabat yang tidak teliti dalam menyusun perencanaan dan penganggaran. Pejabat tersebut hanya mengusulkan program pembangunan, namun tidak mengetahui situasi sebenarnya yang ada di lapangan. Ketika anggaran sudah disahkan maka terjadi kesulitan untuk merealisasikan karena terdapat berbagai kendala lapangan (Halim, 2014).

Hakekatnya dalam suatu organisasi baik organisasi privat maupun organisasi publik, kedudukan manusia merupakan unsur utama yang memiliki karakteristik seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman. Komponen karakteristik inilah yang kemudian membentuk perilaku seseorang dan akan menggerakkan serta membawa organisasi untuk mencapai tujuan (Thoha, 2011). Setiap organisasi mutlak membangun SDM yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi. SDM yang kompeten merupakan keunggulan tersendiri dalam suatu organisasi sekaligus sebagai pendukung daya saing organisasi pada era globalisasi dalam menghadapi

lingkungan kerja serta kondisi sosial masyarakat yang mengalami perubahan yang dinamis (David, 2016). Ditambah dengan adanya regulasi/aturan sebagai pedoman dalam bekerja yang memerlukan pemahaman terhadap aturan yang mengikat dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang diambil dengan aturan yang ada (Putri, 2014). Sementara itu, dalam konsep penganggaran sektor publik disebutkan bahwa salah satu karakteristik yang wajib dimiliki oleh pemerintah selaku pengelola anggaran adalah komitmen yang tinggi terhadap nilai, tujuan dan fungsi organisasi pemerintah. Dengan adanya komitmen, teori anggaran sektor publik meyakini akan lebih memudahkan dalam pencapaian target pemerintah.

Selanjutnya, Merchant (1981) mengemukakan bahwa kadar komitmen organisasi yang baik yang dimiliki pengelola anggaran, akan sangat memungkinkan para pengelola lebih mudah dalam mengkomunikasikan, mengungkapkan serta memberikan informasi lokal (pribadi) yang diketahui untuk dimasukkan dalam standar atau sebagai dasar penilaian sebuah anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan Nouri dan Parker (1996) menyimpulkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi seorang individu maka semakin tinggi kerelaan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Ratifah dan Ridwan (2012) juga menyatakan bahwa kepercayaan dari seseorang terhadap nilai-nilai organisasi, dan kerelaan seseorang untuk mendukung dalam merealisasikan tujuan organisasi serta kesetiaan untuk tetap menjadi bagian organisasi merupakan unsur-unsur yang merupakan dasar dari komitmen organisasi. Anggota organisasi akan merasa senang dalam bekerja jika merasa terikat

dengan nilai dan tujuan organisasi, hal ini akan berdampak pada tanggung jawab dan kesadaran yang dimiliki anggota dalam menjalankan organisasi (Randall, 1990). Fenomena mengenai penyerapan anggaran yang belum maksimal dan belum proporsional merupakan hal yang setiap tahun terjadi, sehingga perlu suatu kajian penelitian untuk mengetahui penyebab tersebut. Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Eko Saryanto (2017).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan anggaran, faktor kompetensi sumber daya manusia dan faktor penggunaan teknologi informasi dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Penyerapan Anggaran pada BAPPEDA Kabupaten Toraja Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap tingkat Penyerapan Anggaran?
3. Apakah Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap tingkat Penyerapan Anggaran
2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap tingkat Penyerapan Anggaran.
3. Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi terhadap tingkat Penyerapan Anggaran

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pada bidang sektor publik (keuangan/anggaran).
2. Memberikan tambahan informasi kepada penelitian sektor publik khususnya mengenai variabel Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Keterlambatan Penyerapan Anggaran.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Guna menambah pengetahuan dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk laporan.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Toraja Utara, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah daerah dalam mencapai tingkatan penyerapan anggaran pemerintah.
3. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan fokus penelitian pada aparat yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan/anggaran, yaitu; Kepala Bidang Perencanaan dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing OPD.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan, bab ini berisi tinjauan secara umum perencanaan penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkajinya dari berbagai sumber baik penelitian-penelitian terdahulu sehubungan dengan judul sehingga menghasilkan hipotesis dan

digambarkan di kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, menguraikan kerangka konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV Metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data. Bab ini menjelaskan teknik pengolahan data sampai pada penggunaan alat analisis yang digunakan peneliti.

Bab V Hasil Penelitian, menguraikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan metode dan prosedur yang diuraikan dalam metodologi penelitian yang terdiri atas paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI Pembahasan, menguraikan dan membahas hasil analisis data penelitian sebagai dasar dalam menarik kesimpulan.

Bab VII Penutup. menguraikan mengenai kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian serta saran dari pembahasan yang dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran yang terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia memiliki kondisi yang sama. Diistilahkan oleh *World Bank* (2005) yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun (*slow and back-loaded expenditure*). Penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun biasanya belanja yang *nonrecurrent*, seperti belanja modal dan dana bantuan sosial.

Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Senada dengan pendapat Halim, menurut Kuncoro (2013), penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pada ketercapaian target. Kuncoro, (2013) menyatakan bahwa kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi penyerapan anggaran sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan. Sederhananya, dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikategorikan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Terdapat dua sudut pandang mengenai rendahnya penyerapan anggaran (Halim 2014). Ada pun pendapat tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah realisasi anggaran pada akhir tahun dibandingkan dengan anggarannya.
- 2) Dari segi ketidakproporsionalitasnya penyerapan anggaran.

Selanjutnya menurut Lubis (1993) dalam Shenny (2012), mengatakan bahwa efektivitas penyerapan anggaran lebih menekankan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Tepat, diartikan bahwa apa yang dikehendaki tercapai memenuhi target dan apa yang diinginkan menjadi realitas.
- 2) Cepat, diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai atau sebelum waktu yang ditetapkan.
- 3) Hemat, diartikan bahwa tidak terjadi pemborosan dalam bidang apapun dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut.

- 4) Selamat, diartikan bahwa tidak mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan.

2.1.2 Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melaksanakan suatu kegiatan/pekerjaan. Menurut Mardiasmo (2009) perencanaan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Notoatmodjo (2003) “perencanaan adalah inti manajemen karena semua kegiatan organisasi yang bersangkutan di dasarkan pada rencana tersebut”. Apabila perencanaan bisa dijalankan secara teratur, maka tidak akan timbul permasalahan. Pokok dari perencanaan adalah salah satu langkah antisipasi atas kejadian di masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Perencanaan anggaran adalah salah satu bagian dari perencanaan organisasi, baik untuk organisasi publik maupun organisasi privat.

Menurut Conyers dan Hills dalam Kuncoro (2012), perencanaan diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Merujuk pada definisi tersebut, terdapat empat elemen dasar perencanaan, yaitu :

- 1) Merencanakan berarti menentukan pilihan.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa tahap perencanaan adalah proses pemilihan berbagai sumber daya yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan.

- 2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.

Pada tahap perencanaan dilaksanakan suatu proses alokasi besarnya sumber daya-sumber daya yang digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu pilihan berarti menentukan prioritas pembangunan daerah, baik fokus (sektoral) maupun lokusnya (wilayah). Lokus memperlihatkan wilayah (kabupaten/kota/kecamatan/kawasan) yang ingin dikerjakan, sedangkan fokus memperhatikan sektor yang menjadi prioritas.

- 3) Perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan.

Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai.

- 4) Perencanaan untuk masa depan

Diartikan bahwa perencanaan merupakan tahap yang diperlukan dalam menentukan masa depan.

Berbicara tentang perencanaan dan penganggaran anggaran pemerintah, sejak tahun 1990 proses tersebut sudah berubah secara substansial, aspek perubahan dan tuntutan yang mendasar terletak pada pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah dan ketersediaan dari teknologi informasi (Kelly et al.2008). Di Indonesia, tuntutan perubahan tersebut mulai terasa sejak tahun 1998, dikarenakan adanya tuntutan reformasi yang menuntut untuk diwujudkannya sistem tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 menekankan pengintegrasian sistem pertanggungjawaban kinerja kedalam sistem penganggaran. Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut memaparkan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) yang akan dicapai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBD/APBN dalam undang-undang tersebut meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD merupakan tahapan awal dalam perumusan APBD. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Setelah RKPD ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD (KUA).

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan; menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD).

Selanjutnya menyusun RKA-OPD yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dijabarkan sampai dengan penjabaran objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-OPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

5. Penyiapan Raperda APBD.

Selanjutnya, berdasarkan pada RKA-OPD yang telah disusun oleh OPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-OPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD.

6. Penetapan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa setiap organisasi memerlukan sumber daya dari lingkungan baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam teori Edward III yang dimaksud dengan sumber daya adalah bisa merupakan staf, keuangan, peralatan dan kewenangan.

Di dalam organisasi sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada organisasi. Menurut Sutrisno (2009) sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik kemampuan, keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi maka akan semakin baik kinerja organisasi tersebut. Sumber daya manusia pada prinsipnya merupakan satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Tanpa sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, sebuah organisasi yang memiliki tujuan yang bagus serta sarana dan prasarana yang canggih akan sulit mencapai tujuannya (Harsono, 2011).

Menurut Sumarsono (2003) sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan potensial yang dimiliki oleh manusia yang terdiri dari kemampuan berpikir, berkomunikasi dan bertindak untuk melaksanakan suatu tindakan baik secara teknis maupun manajerial. Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individual maupun bersama (Ardana et al, 2012).

Sunyoto (2012) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia meliputi tiga pengertian, yaitu: (a) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, (b) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi (c) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis.

Dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah juga harus senantiasa melakukan peningkatan sumber daya manusianya. Kelancaran penyelenggaraan

tugas pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada kualitas dan kesempurnaan pengelolaan aparatur negara khususnya pegawai negeri, penyediaan anggaran untuk pemberdayaan, serta peralatan yang mendukungnya (Harsono, 2011).

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Maulana (2011) belum maksimalnya penyerapan penggunaan anggaran APBD oleh beberapa OPD menunjukkan bahwa OPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya manusianya.

Menurut Matutina (2001) kualitas Sumber Daya Manusia yang mencakup komponen-komponen berikut :

- Pengetahuan (*knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki pegawai.
- Keterampilan (*Skill*) yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional dibidang tertentu yang dimiliki pegawai

- Kemampuan (*ability*) yaitu kemampuan yang terbentuk dari jumlah kompetensi yang dimiliki seorang pegawai yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab.

Menurut Arif dan Halim (2011) Penempatan pegawai memerlukan perhatian yang penuh dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD. Apabila orang yang ditempatkan tidak tepat pada jabatan-jabatan yang tersedia akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap perkembangan organisasi yaitu para pegawai akan merasa frustrasi dalam bekerja, para pegawai akan bekerja lamban dan hasil kerjanya kurang bermutu.

Pegawai negeri sipil juga bertugas untuk melaksanakan program/ kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. Salah satu tugasnya adalah menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kurangnya pengetahuan pegawai negeri sipil menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dokumen pendukung sebagai syarat pengajuan surat pengajuan pembayaran (SPP) untuk dapat diterbitkan surat perintah membayar (SPM) yang berdampak pada realisasi anggaran (Miliasih, 2012).

2.1.4 Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain

kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini antara lain yang menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et al.* (1991) dalam Tjhai (2003:3), merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja institusi maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat transparansi dan pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Dalam rangka

mewujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah; baik provinsi maupun kabupaten/kota; untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 39 Tahun 2006 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan monitoring dan Evaluasi Pembangunan. Aplikasi *SIMonev* digunakan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber pada dana APBD dan APBN serta mengevaluasi indikator perencanaan kegiatan pembangunan.

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (*SIMonev*) adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah unit organisasi pemerintahan dalam menetapkan dan melaporkan berbagai capaian target kinerja, anggaran, serta rencana pengadaan yang telah disusun. Dengan adanya aplikasi ini, semua informasi terkait capaian kinerja, anggaran, dan pengadaan unit organisasi dapat terpantau secara mudah dan *up to date*.

Aplikasi *SIMonev* ini terdapat dua sistem utama yang satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi, yaitu *SIMonev* APBN dan *SIMonev* APBD. Secara garis besar perbedaan antara keduanya adalah :

- 1) *SIMonev* APBN di peruntukkan untuk tingkat Bappeda Provinsi, sedangkan untuk *SIMonev* APBD di peruntukkan untuk Kabupaten dan Kota.
- 2) *SIMonev* APBN mengacu pada Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sedangkan untuk *SIMonev* APBD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Besarnya anggaran dan banyaknya kegiatan yang harus dilaporkan merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk membuat laporan Monitoring dan perencanaan Evaluasi Pembangunan, apalagi dilihat dari lokasi dan jarak yang harus ditempuh. Untuk itu keberadaan Aplikasi *SIMonev* yang berbasis internet “*web based*” menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan bagi pemerintah daerah untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaporan kegiatan pembangunan, karena selama ini pemerintah daerah selalu kesulitan untuk menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan secara cepat dan tepat waktu serta standar bagi seluruh OPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui aplikasi *SIMonev* ini adalah:

- 1) Sebagai alat bantu untuk melakukan pengisian form evaluasi RKPD sesuai Permendagri 86 Tahun 2017;

- 2) Sebagai alat bantu agar kegiatan input evaluasi RKPD tidak perlu mengetik ulang program, kegiatan dan indikator kinerja demi mengurangi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran;
- 3) Sebagai alat bantu untuk input capaian indikator kinerja perangkat daerah;
- 4) Sebagai alat bantu untuk memastikan kesesuaian antar dokumen perencanaan;
- 5) Menciptakan sistem perencanaan yang efektif dan efisien dengan menggunakan Aplikasi yang terintegrasi dan online;
- 6) Mengakomodir perubahan-perubahan format dan data sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 7) Meningkatkan kemudahan bagi pengguna dan efisiensi dalam menggunakan aplikasi e-Planning;

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dalam proses dan pasca implementasi Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan ini adalah :

- 1) Kemudahan proses kendali, manajemen dan pemasukan data-data pengendalian pembangunan.
- 2) Mengetahui kemajuan pembangunan berdasarkan indikator kinerja pembangunan
- 3) Mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan.

Karakteristik khusus yang dimiliki oleh aplikasi SIMonev adalah menu Monitoring dan Evaluasi yang menampilkan data kegiatan anggaran. Dimana pada data kegiatan anggaran tersebut terdapat rincian jumlah program, kegiatan, pagu, dan realisasi anggaran pemerintah Daerah.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran untuk mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Penelitian - penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel - variabel yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 2.1: Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bakara F.S. (2000)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pembangunan Pemda DKI Jakarta	Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan Anggaran Pembangunan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana perencanaan, pengaanggaran, pengawasan dan pelaporan satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi
2	Sulaeman, et al (2011)	Penyerapan Anggaran di Kementrian Keuangan Indonesia dan Faktor faktor yang mempengaruhi	Perencanaan kegiatan yang baik dan menyeluruh merupakan faktor yang paling penting yang memengaruhi serapan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3	Kuswoyo, Iwan Dwi (2011)	Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri).	Terkonsentrasinya penyerapan anggaran belanja di akhir tahun anggaran disebabkan oleh faktor perencanaan.
4	Hendris Heriyanto (2012)	Faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di kementerian, lembaga di wilayah Jakarta.	Keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah Jakarta disebabkan oleh: (1)Faktor Perencanaan (2) Faktor Administrasi (3) Faktor SDM (4)Faktor Dokumen Pengadaan (5) Faktor Ganti Uang
5	Malahayati, Islahuddin dan Basri (2015)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh	Secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh terhadap Penyerapan anggaran
6	Priatno dan Khusaini (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar	Perencanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja
7	Kaharuddin (2012)	Faktor - faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Belanja Dana Alokasi Khusus di Bidang Pendidikan - 2010)	Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010 yaitu faktor regulasi, faktor pelaksanaan anggaran, faktor kapasitas sumber daya manusia, faktor penganggaran daerah, dan faktor pengawasan

Lanjutan Tabel: 2.1

8	Halim, et al. (2012)	Identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya Penyerapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2011	Masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau memiliki faktor berbeda-beda yang mengakibatkan rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
9	Anfujatin (2019)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital Pada Satker Jajaran Polda Riau	Variabel perencanaan anggaran, pencatatan administrasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran sedangkan variabel lingkungan birokrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dalam kegiatan pengamanan objek vital di Satker Polda Riau
10	D. Ramdhani (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Banten	Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Dalam penelitian ini penerapan kompetensi sumber daya manusia pada Dinas di Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori baik/efektif.
11	Jurnali dan Supomo (2002)	Pengaruh faktor kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik	Terdapat kesesuaian antara teknologi dan tugas yang didukungnya dengan kinerja individu yang baik. Walaupun tidak didukung secara empiris, namun pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki dampak positif terhadap kinerja individu.
12	Muh. Saleh dan Ventje Ilat (2013)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen
13	Siti Soimah (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
14	Ruddy Mantiri, et.al (2018)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Anggaran Pada Universitas Sam Ratulangi Manado	Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan, Kompetensi Pegawai berpengaruh positif tapi tidak signifikan dan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran.